

**STRATEGI PEMANFAATAN LAHAN HUTAN RAKYAT DI  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI  
BARAT**

*STRATEGY FOR THE UTILIZATION OF COMMUNITY FOREST  
LAND IN POLEWALI MANDAR REGENCY, WEST SULAWESI  
PROVINCE*

**MUHAMMAD AGUSFARTHAM RAMLI**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

STRATEGI PEMANFATAN LAHAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD AGUSFARTHAM RAMLI

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2021

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**Strategi Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar  
Provinsi Sulawesi Barat**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AGUSFARTHAM RAMLI**  
Nomor Pokok: M012181007

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 5 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

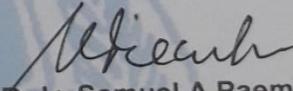
Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M. Agr

Anggota



Prof. Dr. Ir. Samuel A. Paembonan

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Kehutanan,



Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M. Si

Dekan Fakultas Kehutanan,



Dr. A. Mujetahid M., S. Hut., M. P

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Agusfartham Ramli

Nomor Mahasiswa : M012181007

Program Studi : Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Juli 2021  
Yang Menyatakan



Muhammad Agusfartham Ramli

## PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “**Strategi Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat**” Sekaligus merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi PascaSarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari terdapat banyak hambatan dalam proses penyelesaian tesis ini. Namun dengan dukungan dan dorongan dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Olehnya itu dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr.Ir. Daud Malamassam, M.Agr** dan **Prof. Dr.Ir.Samuel A. Paembonan** sebagai dosen pembimbing, atas segala bimbingan, motivasi, waktu dan arahannya kepada penulis selama menyusun tesis ini.
2. Bapak **Dr. Ir. Syamsuddin Millang, M.S** Bapak **Dr. Ir. Anwar Umar, M.S** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si** sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberikan masukan pemikiran, koreksi serta arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.
3. Para Bapak/Ibu dosen dan pegawai yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada penulis.

4. Terimah kasih kepada teman sekaligus teman diskusi yaitu **Kak Dila, Kak Daud, Kak Rusman** dan **Nur Anas** dalam membantu dalam menyusun tesis ini. teman-teman Pasca Sarjana Angkatan 2018 fakultas kehutanan dalam menyusun tesis ini
5. Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada orang tuaku tercinta **Drs. H. Muh. Ramli Azis Musa** dan **Dra. Hj. Juhanis Amin** yang selama ini meberikan segalanya untuk saya, rasa terima kasih ini tidak akan pernah menandingi cinta , kasih sayang, pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kakakku **Rahyuni Rahayu, SE., M.SI** dan adikku **Abd. Rachmansyah Ramli, S.Ikom** yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang perhatian serta persaudaraan indah selama ini.

Dengan seluruh kerendahan hati, penulis sangat menyadai sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu semua saran dan kritik dalam penyempurnaan akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kiranya Tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi setiap langkah kita. Aamiin.

Makassar, 5 Juli 2021

Penulis

## ABSTRAK

MUHAMMAD AGUSFARTHAM RAMLI. *Strategi Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat* (dibimbing oleh Daud Malamassam dan Samuel A. Paembonan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan dan potensi hutan rakyat dan merumuskan strategi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat untuk mendukung optimalisasi produksi di Kabupaten Polewali Mandar. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang menerapkan pola agroforestry yang diterapkan pada hutan rakyat. Jumlah sampel penelitian adalah 30 orang yang memiliki tipe pemilik hutan rakyat. Data yang diperoleh diidentifikasi dan dianalisis melalui metode Force Field Analysis dan Analysis Hierarki Process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di ketiga desa yang menerapkan pola hutan rakyat dengan membudidayakan jenis tanaman jati putih, sengon, meranti merah dan jati super, pada lahan hutan milik mereka. Selanjutnya teridentifikasi pula bahwa pengelolaan hutan rakyat di ketiga desa melalui sejumlah isu yang terkait dengan faktor pendorong dan penghambat. Strategi yang tepat untuk pemanfaatan lahan hutan rakyat di Kabupaten Polewali Mandar adalah strategi intensif yang terintegrasi secara horizontal, melalui perluasan kegiatan masyarakat dan pembangunan jaringan sistem informasi dan komunikasi, berdasarkan suatu perencanaan yang melibatkan semua pihak terkait.

*Kata Kunci : FFA, Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan.*

## ABSTRACT

MUHAMMAD AGUSFARTHAM RAMLI. *Community Forest Land Utilization Strategy in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province* (supervised by Daud Malamassam and Samuel A. Paembonan)

This study aims to determine the management conditions and potential of community forest and formulate strategies for land utilization under community forest for support production optimization in Polewali Mandar Regency. The object research is the village community who applies the agroforestry pattern that is applied to community forests. The number of research samples is 30 people who have the type of community forest owner. The data obtained were identified and analyzed through the methods of Force Field Analysis and Process Hierarchy Analysis. The results showed that the people in the three villages applied the patterns of cultivating the species of white teak, sengon, red meranti and super teak, on their forest lands. Furthermore, it was also identified that community forest management affects people's in the three villages through a number of issues related to the driving and inhibiting factors. The right strategy for the use of community forest land in Polewali Mandar Regency is an intensive strategy that is horizontally integrated, through the expansion of community activities and the development of an information and communication system network, based on a plan that involves all relevant parties.

*Kata Kunci : Community Forest, FFA and Land utilization*

## DAFTAR ISI

<b>PRAKARTA.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Defenisi Strategi.....	6
B. Hutan Rakyat.....	7
1. Pengeritan dan Pola Hutan Rakyat.....	7
2. Potensi Hutan Rakyat.....	12
3. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat....	15
4. Kondisi Hutan Rakyat.....	18
C. Kondisi Ekonomi Dan Sosial Masyarakat.....	20
1. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	19
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Lahan.....	24
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Hutan Rakyat.....	26
a). Faktor Internal.....	27

b). Faktor Eksternal .....	29
D. Strategi Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat .....	30
E. Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan.....	32
F. Beberapa Metode Analisis Strategi Pengambilan Keputusan .....	34
1. Force Filed Analysis (FFA) Atau Analisis Medan Kekuatan .....	34
2. Analisis Hierarchy Proses (AHP) .....	36
G. Rumus Pendapatan Hutan Rakyat.....	39
H. Kerangka Pikir Penelitian .....	41
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43
B. Bahan Dan Alat .....	43
C. Jenis Dan Sumber Data .....	43
D. Metode Pelaksanaan.....	44
1. Metode Pengumpulan Data.....	45
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Potensi Dan Keadaan Sosial Ekonomi Hutan Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar.....	50
1. Potensi Hutan Rakyat.....	50
2. Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat.....	57
B. Analisis Faktor Pendorong ( <i>Driving Force</i> ) Dan Faktor Penghambat ( <i>Restraining Force</i> ).....	71
1. Faktor Pendorong.....	77
a. Implementasi Kebijakan .....	77
b. Status Kepemilikan Tanah.....	79
c. Kelembagaan .....	80

d. Jenis Tanaman Yang Dikelola .....	83
e. Kapasitas .....	85
f. Mekanisme Pasar.....	87
g. Ketahanan Pangan .....	90
2. Faktor Penghambat.....	92
a. Implementasi Kebijakan .....	92
b. Status Kepemilikan Tanah.....	94
c. Kelembagaan .....	97
d. Jenis Tanaman Yang Dikelola .....	99
e. Kapasitas .....	101
f. Mekanisme Pasar.....	104
g. Ketahanan Pangan .....	108
C. Matrix Gabungan Berpasangan.....	109
1. Matrix Gabungan Berpasangan Faktor Pendorong.....	109
2. Matrix Gabungan Berpasangan Faktor Penghambat.....	112
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>129</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Test</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Inventarisasi faktor-faktor pendorong ( <i>driving force</i> ) dan penghambat ( <i>restraining force</i> ) pengelolaan hutan rakyat di Desa Rea, Desa Mirring dan Desa Paku.....	45
Tabel 2	Skala Saaty.....	46
Tabel 3	Nilai Pembangkit Random (RI).....	47
Tabel 4	Faktor Pendorong (Driving Force).....	48
Tabel 5	Faktor Pengahmbat (Restraining Force).....	49
Tabel 6	Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat.....	57
Tabel 7	Inventarissi Faktor Pendorong (Driving Force).....	72
Tabel 8	Inventarisasi Faktor Penghambat (Restraining Force).....	73
Tabel 9	Hasil Analisis Faktor Pendorong.....	75
Tabel10	Hasil Analisis Faktor Penghamba.....	76
Tabel 11	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor pendorong dalam isu implementasi kebijakan.....	110
Tabel 12	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor pendorong dalam isu status kepemilikan tanah.....	110
Tabel 13	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor pendorong dalam isu kelembagaan.....	111
Tabel 14	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor pendorong dalam isu jenis tanaman yang dikelola.....	111
Tabel 15	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor	

	pendorong dalam isu kapasitas.....	111
Tabel 16	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor pendorong dalam isu mekanisme pasar.....	111
Tabel 17	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor pendorong dalam isu ketahanan pangan.....	112
Tabel 18	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor penghambat dalam isu Implementasi kebijakan.....	113
Tabel 19	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor penghambat dalam isu status kepemilikan lahan.....	113
Tabel 20	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor penghambat dalam isu Implementasi kelembagaan.....	113
Tabel 21	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor penghambat dalam isu jenis tanaman yang dikelola.....	114
Tabel 22	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor penghambat dalam isu kapasitas.....	114
Tabel 23	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor penghambat dalam isu mekanisme pasar.....	114
Tabel 24	Matrix gabungan berpasangan dari keempat pakar faktor penghambat dalam isu ketahanan pangan.....	114

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Test</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Analisis Medan Kekuatan.....	35
Gambar 2.	Kerangka Pikir Penelitian.....	42
Gambar 3.	Pelaksanaan Penelitian.....	44
Gambar 4.	Pengaruh Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat.....	115

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1.	Kuisisioner Penelitian Petani Hutan Rakyat .....	129
2.	Penerima Pola Hutan Rakyat Murni.....	134
3.	Penerima Pola Hutan Rakyat Agroforestry .....	135
4.	Penerima Pola Hutan Rakyat Campuran.....	136
5.	Penerima Tanaman Perkebunan.....	137
6.	Penerima Tanaman Pertanian.....	147
7.	Upah Tenaga Kerja .....	149
8.	Biaya Penyusutan Alat .....	150
9.	Biaya Pajak Lahan .....	151
10.	Biaya Pupuk .....	152
11.	Biaya Keseluruhan .....	153
12.	Pendapatan Sektor Perkebunan.....	155
13.	Pendapatan Sektor Pertanian.....	157
14.	Pendapatan Tanaman Semusim Per. Tahun.....	159
15.	Hasil Pendapatan Keseluruhan Tanaman Kehutanan .....	161
16.	Kuisisioner Penilaian Pakar .....	163
17.	Hasil Analisis Penilaian Pakar .....	169
18.	Hasil Matrix Pengabungan Penilaian Pakar Faktor Pendorong ..	185
19.	Hasil Matrix Pengabungan Penilaian Pakar Faktor Penghambat..	187
20.	Dokumentasi Penelitian.....	189

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan rakyat sudah sejak lama memberikan sumbangan ekonomi maupun ekologis baik langsung kepada pemiliknya maupun kepada masyarakat sekitar. Pada awalnya perhatian para birokrat, pelaku bisnis, pemerhati lingkungan maupun peneliti sangat terbatas (Widiarti, 2015). Pada masa-masa awal orde baru, hutan alam memberikan sumbangan sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup besar kepada negara. Pengelolaan hutan alam yang lebih berorientasi pada pendapatan ekonomi dengan dukungan pengusaha kehutanan terbukti tidak mampu melestarikan hutan bahkan menyisakan kerusakan hutan yang sangat parah (Arshanti dkk., 2017).

Pihak-pihak tersebut sedikit demi sedikit mulai memperhatikan keberadaan hutan rakyat. Bahkan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah diakui sebagai salah satu solusi permasalahan kehutanan di Indonesia (Apriyanto dkk., 2016). Tekanan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, industri dan perumahan menyebabkan terjadinya konversi hutan menjadi lahan perumahan, kawasan industri dan pertanian (Herlindawati dkk., 2018). Di lain pihak, masih banyak lahan kering yang tidak produktif sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Salah satu usaha untuk mengembangkan pemanfaatan lahan kering ataupun lahan kritis yang tidak produktif adalah dengan menanam tanaman berkayu (hutan rakyat) yang mempunyai nilai komersial. Selain manfaat tersebut,

pengembangan hutan rakyat juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan (Setiawan dkk., 2014).

Luas seluruh hutan di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 95.543.73 hektare atau sekitar 47,29% dari luas wilayah kabupaten, yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas 72.589 ha (75,88% dari luas kawasan hutan) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 23.065 ha (24,12%) dan untuk hutan rakyat mempunyai luas 1.600 ha yang terdapat di Kecamatan Binuang merupakan hutan rakyat. Hutan rakyat dari ketiga lokasi penelitian di Kecamatan Binuang memiliki luas masing-masing yaitu Desa Mirring memiliki luas kawasan 70 ha, sedangkan untuk Desa Rea memiliki luasan hutan yaitu 60 ha dan Desa Paku memiliki luasan kawasan hutan rakyat yaitu 100 ha. Hutan Rakyat secara terminologi terpisah dari hutan secara keseluruhan (Mapilli, 2016). Masyarakat memanfaatkan sebagian besar lahannya untuk hutan rakyat dengan luasan berkisar antara 0,3 – 3 hektare. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat cukup tinggi dalam memanfaatkan lahan untuk hutan rakyat (Dinas Kehutanan, 2015). Potensi hutan rakyat didominasi tanaman jati putih (*Gmelina arborea*) dengan umur pohon rata-rata berkisar 10 tahun dengan potensi sebesar 226 pohon/Ha atau volume rata-rata 4 m<sup>3</sup>/ha. Pada tepi lahan hutan tersebut masyarakat menanam rumput gajah dan gamal yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Siarudin dkk., 2017).

Pada optimalisasi penggunaan lahan hutan rakyat terdapat peluang untuk menerapkan pola agroforestri yang merupakan suatu sistem

pengelolaan lahan berasaskan kelestarian (Mayrowani & Ashari, 2011). Pola agroforestri yang mengkombinasikan produksi tanaman pertanian dan tanaman hutan dan atau hewan, secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama dapat meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan (Wijayanti dkk., 2015). Pengembangan hutan rakyat merupakan program nasional yang sangat strategis, namun baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun internasional atau global, meliputi 3 aspek yaitu ekonomi, ekologi dan sosial budaya (Qurniati, 2010). Berdasarkan ketentuan formal yang ada, pembangunan hutan rakyat sesungguhnya merupakan semangat desentralisasi melalui pelimpahan kewenangan dan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.

Pertimbangannya adalah pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) lebih mengetahui keadaan hutan didaerahnya baik potensi maupun persebarannya (Kambey, 2015). Pemerintah Daerah berperan sangat penting untuk memfasilitasi, mengkoordinasi, dan meregulasi pengembangan hutan rakyat di daerahnya. Harapan pemerintah dengan adanya hutan rakyat selain untuk mencukupi kebutuhan kayu juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat setempat (Anggraini dkk., 2019).

Perkembangan hutan rakyat saat ini cukup pesat terutama setelah pasar kayu semakin baik dan didukung oleh minat masyarakat/petani yang cukup tinggi untuk menanam jenis kayu-kayuan di lahan pekarangannya, khususnya di Sulawesi Barat (Dinas Kehutanan, 2016). Hutan rakyat

memiliki potensi cukup besar dalam menyediakan kayu bulat baik untuk kebutuhan industri perkayuan maupun untuk keperluan masyarakat. Jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan rakyat bervariasi tergantung permintaan kayu yang sudah tumbuh secara alami. Setiap jenis kayu memiliki karakteristik atau sifat-sifat tersendiri dan sifat tersebut perlu dipahami dan diketahui sebelum kayu itu digunakan, karena sifat-sifat tersebut pada dasarnya sangat menentukan kualitas kayu bagi suatu peruntukan tertentu. Lahan hutan rakyat tersebut belum dimanfaatkan secara optimal bila dilihat dari pengaturan komposisi jenis tanamannya. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan lahan hutan rakyat, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknik budidaya seperti pengaturan pola tanam, jarak tanam dan pemilihan jenis tanaman. Penelitian ini akan membandingkan 3 tipe dalam pemanfaatan lahan dalam mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

Beberapa kendala yang terkait dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Polewali Mandar yaitu sistem pengelolaan pemanfaatan lahan hutan rakyat. Masyarakat kurang memahami teknik penanaman agroforestry, seperti adanya pengaturan pola dan jarak tanam yang tepat serta pemilihan jenisnya. Pemilihan jenis dalam model agroforestry dengan mengkombinasikan umur panen tanaman. Tanaman semusim merupakan tanaman dengan umur pendek, tanaman sela untuk jangka menengah dan tanaman kehutanan untuk jangka panjang. Dengan menerapkan pola

tersebut, dari segi pendapatan masyarakat akan memiliki keberlanjutan hasil panen dalam setiap musim panen.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan lahan hutan rakyat di Kabupaten Polewali Mandar belum optimal.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui kondisi pengelolaan dan potensi Hutan Rakyat
- b. Merumuskan strategi pemanfaatan lahan di bawah tegakan Hutan Rakyat untuk mendukung optimalisasi produksi di Kabupaten Polewali Mandar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau masukan untuk mendasari perumusan rekomendasi bagi masyarakat/petani dalam pengelolaan Hutan Rakyat (HR), yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan pendapatan dan stabilitas ketahanan pangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Strategi**

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien, serta harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep yang harus terus menerus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi.

Menurut David (2011) dalam penelitian (Supriono dkk., 2013) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan. Menurut Rangkuti (2013) dalam penelitian (Fauzan dkk., 2019)

berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **B. Hutan Rakyat.**

### **1. Pengertian dan Pola Hutan rakyat**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian diterangkan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 berdasarkan status kepemilikannya, Indonesia hanya mempunyai dua macam hutan yaitu hutan negara dan hutan hak. Pengertian hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Menurut penelitian (Rusyana dkk., 2020) hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh atau dibangun oleh masyarakat di atas tanah milik dengan jenis-jenis tanaman hutan. Pengertian hutan rakyat sendiri adalah hutan yang tumbuh di atas lahan milik rakyat baik petani secara perorangan maupun bersama-sama. Hutan rakyat terbentuk dari kegiatan swadaya masyarakat dengan maksud untuk menghasilkan kayu dan hasil-hasil lainnya secara ekonomis dengan memperhatikan unsur-unsur keberlanjutan dan perlindungan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dan sosial (Oktalina dkk., 2015).

Menurut penelitian (Anwar, 2018), bahwa perkembangan dalam pembangunan kehutanan menuntut untuk mempertahankan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat/hak. Alasan pemerintah dalam sudah mulai memperhatikan pengembangan hutan hak adalah semakin serasanya kekurangan hasil hutan kayu dari kawasan hutan Negara, baik hasil kayu sebagai bahan kayu maupun bahan kayu pertukangan kayu industri dan kayu bakar. Menurut (Widiawan, 2017) pembangunan hutan rakyat juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan perlindungan hutan upaya pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat setempat. Semakin bertambahnya penduduk dan semakin banyak industri yang membutuhkan bahan baku kayu menuntut semakin besarnya kebutuhan kayu yang harus dipasok, sehingga akan mendorong timbulnya eksekusi yang negatif seperti perambahan hutan, penebangan liar peladang berpindah, dan sebagainya yang akan mengancam kelestarian.

Menurut Perdirjen NOMOR P.7/PDASHL/SET/KUM.1/8/2017 tentang hutan rakyat memiliki pola tanam yang beragam, baik cara memilih jenis yang dikembangkan maupun cara penataannya di lapangan. Pada umumnya pola tanam yang dikembangkan oleh masyarakat petani dapat diklasifikasikan pada 2 pola tanam yaitu murni (monokultur) dan campuran.

#### 1) Hutan Rakyat Murni

Hutan rakyat yang terdiri dari satu jenis tanaman pokok yang ditanam dan diusahakan secara homogen (*Monokultur*), seperti di Pulau Jawa untuk jenis sengon, jati dan di Lampung untuk jenis damar mata kucing.

Dari jenis silvikultur pola tanam ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dalam pembuatan, pengelolaan dan pengawasannya, namun kekurangannya yaitu kurang tahan terhadap serangan hama penyakit dan angin, juga kurang fleksibel karena tidak ada diversifikasi komoditi sehingga ketahanan ekonominya kurang dan penyerapan tenaga kerja bersifat musiman.

## 2) Hutan Rakyat Campuran

- a) Hutan Rakyat Campuran (*Polyculture*) dengan 2 – 5 jenis tanaman kehutanan yang dikembangkan dan diusahakan, seperti sengon, mahoni, dan suren, yang kombinasinya berbeda pada setiap daerah. Dari segi silvikultur cara ini lebih baik dari pada hutan rakyat murni, daya tahan terhadap hama penyakit dan angin lebih tinggi, perakaran lebih berlapis dan dari segi ekonomi lebih fleksibel, hasil yang diperoleh berkesinambungan dan tenaga kerja yang terserap lebih banyak, namun pelaksanaannya memerlukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik dan terampil.
- b) Hutan Rakyat sistem agroforestry/wanatani: Agroforestri adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah-buahan, ternak atau tanaman semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis diantara komponen penyusunnya. pola ini merupakan bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan cabang usaha lainnya seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu. Pola ini berorientasi pada optimalisasi

pemanfaatan lahan secara rasional, baik dari aspek ekonomis maupun aspek ekologis. Penerapannya di lapangan dilakukan dengan cara pemanfaatan suatu ruang tumbuh baik vertikal maupun horizontal dalam bentuk penanaman campuran lebih dari satu jenis seperti jenis kayu-kayuan (sengon, jati), buah-buahan (petai, nangka), tanaman industri (kopi, melinjo), tanaman pangan (singkong, jagung), hijauan makanan ternak (rumput gajah), tanaman obat-obatan (kapolaga, jahe), lebah madu dan lainnya. Kelebihan pola tanam ini yaitu mempunyai daya tahan yang kuat terhadap serangan hama, penyakit dan angin. Secara ekonomis dapat diperoleh keuntungan ganda yang berkesinambungan melalui panen harian, mingguan, bulanan dan tahunan, serta tenaga kerja yang terserap akan lebih banyak dan berkelanjutan.

Menurut penelitian (Mayrowani & Ashari, 2011) pengelolaan hutan rakyat adalah dengan teknik agroforestri. Sistem agroforestri lebih berhasil dibanding dengan pola hutan rakyat yang sudah ada, Serta memberikan sumbangsih dalam hal mengkombinasikan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan untuk meningkatkan keuntungan serta memberikan nilai tambah. Menurut penelitian (Yuwariah, 2015) satu kawasan hutan terdapat pepohonan baik homogen maupun heterogen yang dikombinasikan dengan satu atau lebih jenis tanaman pertanian. Keberhasilan dari suatu pola agroforestry dapat dilihat dari semakin meningkatnya produksi hasil-hasil budidaya tanaman dibawah tegakan.

Menurut penelitian (Widarti, 2015) Hutan rakyat campuran adalah pola campuran lebih sederhana dibanding pola-pola lainnya baik dari segi penutupan tajuk maupun struktur vegetasinya. Sehingga lebih baik dari segi manfaat serta upaya masyarakat dalam peningkatan produktivitas serta teknik silvikultur dan modifikasi jenis pola tanam.

Menurut penelitian (Rendra dkk., 2016) adanya perbedaan dengan pola tanam pertanian murni, pola tanam agroforestri menawarkan kombinasi hasil produksi yang lebih stabil. Adanya komponen pohon yang bisa diatur pemungutan hasilnya hanya bila diperlukan (bisa dibiarkan hidup dengan tidak takut busuk bahkan bertambah nilainya), merupakan tabungan masa depan. Kestabilan itu akan lebih baik lagi apabila komponen ternak dimasukkan.

Adapun Model Agroforestri pola tanam yang diterapkan secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Tanaman Pokok; berupa tanaman kehutanan yang merupakan prioritas utama tanaman yang ditujukan sebagai produksi kayu dengan penentuan daur tebang selama 5 tahun. Jenis tanaman yang dipilih yaitu jenis sengon (*Faraserianthes falcataria*).
- b) Tanaman Semusim (Tahap I); merupakan tanaman pertanian yang berotasi pendek, ditanam diantara tanaman pokok dengan jarak minimal 30 cm dari batang tanaman pokok. Waktu penanaman dilaksanakan pada tahun

pertama atau sebelum tanaman pokok berusia satu tahun, jenis tanaman yang dipilih kacang tanah.

- c) Tanaman semusim (Tahap II); dipilih tanaman pertanian berotasi pendek yang dapat tumbuh dengan/tanpa naungan, ditanam setelah panen tanaman semusim tahap pertama (kacang tanah) sampai batas waktu tanaman pokok berumur dua tahun. Jenis tanaman yang dipilih adalah jahe gajah.
- d) Tanaman Keras; merupakan tanaman pertanian yang berotasi panjang /tanaman perkebunan yang dapat hidup dibawah naungan dan bukan sebagai pesaing bagi tanaman pokok dalam memperoleh cahaya . Ditanaman setelah tanaman pokok berumur 2 tahun, menempati lahan diantara tanaman pokok, tujuan penanaman untuk untuk memperoleh hasil buah (non kayu). Jenis yang terpilih adalah tanaman kopi.

## **2. Potensi Hutan rakyat**

Mengingat latar belakang sekarang pembangunan hutan rakyat, maka setiap kegiatan hutan rakyat selalu berhubungan dengan perbaikan aspek sosial ekonomi rakyat yang terlibat beserta aspek lingkungan fisik dimana hutan rakyat itu berada. Dua aspek ini merupakan dua kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya perbaikan pada satu aspek saja dengan mengabaikan aspek yang lain tidak akan memberikan hasil. Tetapi upaya perbaikan satu aspek dengan memperhatikan aspek yang lain akan memberikan efek yang simultan/ saling mendukung satu sama lain (Ethika dkk., 2014).

Menurut penelaitain (Ethika dkk., 2014) menyatakan bahwa hutan rakyat memiliki potensi untuk: (1) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. (2) pemanfaatan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif dan mengelolanya menjadi lahan yang subur. (3) Peningkatan produksi kayu bakar dan penyediaan kayu perkakas, bahan bangunan dan alat rumah tangga. (4) Penyedia bahan baku industri seperti kertas, korek api, dan lain-lain. (5) Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan. (6) mempercepat rehabilitasi lahan kritis

Pada daerah-daerah di mana hutan rakyat berkembang, salah satu faktor yang mendukung tingginya minat masyarakat mengembangkan hutan rakyat adalah berkaitan dengan jaminan/kepastian atas pemanfaatan hasil hutan. Pemilik lahan juga memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan pola tanam sesuai kebutuhannya (Puspitojati dkk., 2014). Pada lahan miliknya yang terdiri dari beberapa macam kategori seperti pekarangan, tegakan, kebun, bahkan sawah masyarakat menanam berbagai macam tanaman kayu seperti jati, sengon, akasia, mahoni (Suprpto, 2010). Tanam-tanaman tersebut ditanam bercampur dengan tanaman berkayu yang menghasilkan buah-buahan seperti nangka, mangga, petai, durian, duku, dan lain lainnya. Untuk tanaman-tanaman semusim yang biasanya dipungut hasilnya untuk kebutuhan pangan yang bersifat harian (jangka pendek) ada beberapa jenis seperti lombok, kapulaga. Bahkan, pada beberapa tempat atau pada musim hujan padi juga ditanam di bawah tegakan kayu (Suparwata, 2018).

Menurut (Sanudin dan Fauziyah, 2015) Salah satu karakteristik dari hutan rakyat adalah memiliki jangka waktu pertumbuhan relatif lama. Sifat pertumbuhan hutan rakyat yang relatif lama tersebut menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah kurang responsif untuk mengembangkan hutan rakyat secara murni swadaya. Masalah yang mungkin dihadapi dalam membangun hutan rakyat adalah resiko dalam pertumbuhan dan resiko dalam pemasaran hasil. Rotasi pertumbuhan yang panjang menimbulkan ketidakpastian dalam melakukan investasi karena adanya resiko pasar dan resiko fisiologi tegakan hutan yang mempengaruhi pengembalian dana investasi tersebut. Hal ini memperkaya karakteristik dalam usaha pembangunan hutan, yaitu putaran dana yang lambat. Ketidakpastian dalam pertumbuhan sering menimbulkan masalah dalam mendapatkan kredit perbankan serta persyaratannya (Puspitojati dkk., 2014).

Menurut (Supratman, 2016) campur tangan Pemerintah dalam pengusahaan hutan rakyat dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas hutan dan kualitas lingkungan, serta dapat pula menimbulkan dampak negatif. Apabila kebijakan Pemerintah membebani pemilik hutan yang menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi pemilik hutan serta mengurangi minat pemilik untuk mengelola hutan dan pada akhirnya mereka mengalihkan penggunaan hutan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, pengaturan pengusahaan hutan rakyat beserta program pembangunannya seharusnya dapat menyediakan insentif untuk memperkaya pengusahaan hutan rakyat serta memberikan keuntungan bagi pemilik hutan. Selanjutnya

menurut (Setiawan dkk., 2014) pada umumnya hutan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tidak merupakan suatu kawasan yang kompleks, akan tetapi terpecah-pecah di tanah pedesaan lainnya.
- 2) Bentuk usahanya tidak selalu murni berupa usaha bercocok tanam pohon-pohonan, ada kalanya perkebunan, peternakan dan lain-lain.
- 3) Kelangsungan hutan rakyat sangat tergantung oleh kebutuhan lahan untuk kepentingan pemukiman usaha tani di luar kehutanan dan kesinambungan pengolahan serta penanaman.

### **3. Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lahan Hutan Rakyat**

Kelompok tani hutan rakyat merupakan tempat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosiologis, kebutuhan ekonomis dan kebutuhan psikologis. Manusia dapat mengembangkan potensi, aktualisasi dan eksistensi dirinya dengan berkelompok (Supriono dkk., 2013). Perkembangan kelompok tani didasarkan atas faktor-faktor pengikat antara lain, yaitu adanya kepentingan bersama dengan anggotanya, adanya kesamaan kondisi sumber daya alam dalam usaha tani, adanya saling percaya mempercayai antara sesama anggota (Isyaturriyadhah dkk., 2017). Kerjasama antara individu anggota kelompok dalam proses belajar, proses memproduksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil untuk peningkatan pendapatan dan kehidupan yang layak dapat dijalin melalui pendekatan kelompok (Adawiyah dkk., 2017).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat, karena pengelolaan hutan rakyat itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari 2 (dua) hal yaitu status kawasan dan organisasi pengelolanya. Konteks organisasi

dalam hutan rakyat adalah kelompok tani, bagaimana anggota kelompok tani ini mengaktualisasikan dirinya dalam satu wadah (Sudrajat dkk., 2016). Keberadaan kelompok tani hutan rakyat merupakan bentuk partisipasi teroganisasi khususnya dalam bidang kehutanan. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung (Suardi dan Suwardane, 2015). Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan pelibatan diri secara penuh suatu tekad yang sudah terjadi kesepakatan bersama antar anggota masyarakat dalam kelompok. Ada bermacam-macam faktor yang mendorong pelibatan diri, bias karena kepentingan juga bias karena kesetiakawanan atau solidaritas (Nurbaiti & Bambang, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan program hutan rakyat merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi fisik maupun partisipasi nonfisik. Partisipasi fisik adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang yang berupa tindakan fisik dalam pengembangan program hutan rakyat, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengawasan, pemanenan hutan rakyat dan keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan mengenai pengembangan program hutan rakyat (Suyadi dkk., 2019). Sedangkan, Partisipasi nonfisik adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang yang tidak berupa tindakan fisik dalam pengembangan program hutan rakyat. Partisipasi nonfisik dalam pengembangan program hutan rakyat yaitu mengenai pembiayaan, pemikiran dan pengelolaan (manajemen) (Isyaturriyadhah dkk., 2017).

Menurut (Nugroho, 2010) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan merupakan bentuk partisipasi nonfisik dalam pengembangan program hutan rakyat tanpa melakukan tindakan fisik, pemilik hanya melakukan pembiayaan dalam semua kegiatan pengembangan program hutan rakyat (Suardi & Suwardane, 2015).

Menurut Maharani (2013) ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional, yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran merupakan bentuk partisipasi nonfisik dalam pengembangan program hutan rakyat, masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk partisipasi nonfisik hanya memberikan pemikiran dalam menghadapi permasalahan dalam pengembangan program hutan rakyat, seperti memberikan solusi, pendapat dan mendiskusikan hal-hal mengenai penjual.

Konsep pengelolaan (manajemen), pengelolaan pada dasarnya adalah semua pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlakukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut penelitian (Widiawan, 2017) pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Partisipasi masyarakat dalam

bentuk partisipasi nonfisik berupa pengelolaan (manajemen) merupakan penggerakan dan pengarahan dalam kegiatan hutan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat yang dipercayai sebagai pengelola (manajemen) oleh pemilik lahan pengembangan program hutan rakyat.

#### **4. Kondisi Hutan Rakyat**

Hutan rakyat telah memberikan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan oleh penduduk desa pemilik hutan rakyat. Manfaat yang dihasilkan adalah kayu yang digunakan untuk bahan bangunan guna memperbaiki kondisi rumah mereka yang dulunya terbuat dari bambu. Selain itu, petani dapat memperoleh tambahan pendapatan dari menjual kayu hasil hutan rakyat baik dalam bentuk pohon berdiri maupun dalam bentuk kayu bakar. Penjualan kayu hasil hutan rakyat ini biasanya dilakukan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak dan keuangan yang ada kurang mampu mencukupi (Suhartono, 2019).

Ketika pembangunan hutan rakyat berhasil, maka akan ada sumbangsih positif terhadap pembangunan nasional, menurut (Irawan, 2010) sumbangsih tersebut dalam bentuk 1) meningkatkan produksi kayu dan hasil hutan ikutan, 2) memperluas aksesibilitas dan kesempatan kerja di pedesaan, 3) memperbaiki sistem tata air dan meningkatkan proses penguraian CO<sub>2</sub> dan polutan lain di udara karena adanya peningkatan proses fotosintesis di permukaan bumi, 4) dari proses fotosintesis dapat menjaga kadar oksigen udara segar tetap pada tingkat yang menguntungkan bagi makhluk hidup, dan 5) menyediakan habitat untuk menjaga keragaman hayati.

Menurut (Sudrajat dkk., 2016) Pada dasarnya pengelolaan hutan rakyat merupakan upaya menyeluruh dari kegiatan-kegiatan merencanakan, membina, mengembangkan, dan menilai serta mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran secara terencana dan berkesinambungan. Tujuan akhir dari pengelolaan hutan rakyat ini adalah peningkatan peran kayu rakyat terhadap peningkatan pendapatan pemilik/pengusahaannya secara terus-menerus selama daur. Pembangunan hutan rakyat saat ini perlu mendapat perhatian lebih, karena merupakan program nasional yang sangat strategis, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari segi pandangan global, meliputi aspek ekonomi, ekologis maupun sosial budaya (Ethika dkk., 2014). Hutan rakyat yang bermula dari kegiatan penghijauan lahan kritis milik masyarakat, sekarang sudah berkembang menjadi salah satu bidang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha lainnya serta menunjang pemenuhan bahan baku industri(Widiawan, H, 2017).

Di Pulau Jawa, hutan rakyat disamping berasal dari kegiatan program-program bantuan pemerintah, juga dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya murni baik pada lahan kritis maupun lahan produktif. Hal ini disebabkan masyarakat sudah merasakan adanya nilai tambah dari usaha hutan rakyat. Harga komoditas kayu rakyat pun meningkat dari tahun ke tahun, sehingga telah memberi peluang yang besar bagi pengembangan hutan rakyat dan peningkatan kesejahteraan (Saraswati, Y dan Dharmawan, 2014).

## **C. Kondisi Ekonomi Dan Sosial Masyarakat**

### **1. Kondisi Ekonomi Masyarakat**

Dengan luas kepemilikan lahan yang terbatas petani harus mampu menentukan jumlah dan jenis pohon yang ditanam, karena hal ini berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas kayu yang dihasilkan. Oleh sebab itu pendapatan yang diperoleh dari sistem penggunaan lahan yang diterapkan belum mampu memberikan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga tani. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya rumah tangga tani adalah dengan memilih pola penggunaan lahan yang optimal (Antou dkk., 2015).

Sistem agroforestri yang berarti yaitu pertanian dan kehutanan. Artinya, suatu pola yang berusaha memadukan antara sistem pertanian dan sistem kehutanan. Pola ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai macam tanaman pertanian yang disandingkan/ dikombinasikan dengan tanaman kehutanan, dan atau dengan peternakan, perikanan. Menurut (Suparwata, 2018) agroforestri dicirikan oleh keberadaan komponen pohon tanaman semusim dalam ruang dan waktu yang sama. Menurut (Prasetyo, 2016) sistem ini sangat membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahannya melalui fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Ditambahkan oleh (Yuwariah, 2015) bahwa produktivitas, diversitas, kemandirian, dan stabilitas, merupakan keunggulan potensi agroforestri dalam kontribusi terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian bangsa, dan perbaikan lingkungan. Menurut penelitian (Tjatjo dkk., 2015) pengelolaan agroforestri harus diingat bahwa petani atau masyarakat

adalah elemen pokoknya atau sebagai subjek. Agroforestri tidak hanya terfokus pada masalah teknik dan biofisik saja, tetapi juga masalah sosial, ekonomi dan budaya yang selalu berubah dari waktu ke waktu dan sifatnya dinamik.

Pengelolaan hutan rakyat dilaksanakan dalam rangka memberikan hasil optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan hutan oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memahami aspek silvikultur hutan tanaman sekaligus pengelolaan lahan dan tanaman pada hutan tanaman yang dibangun oleh masyarakat (Kusmana, 2011). Atas kesadaran tersebut pemerintah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan hutan rakyat dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan khususnya berkaitan dengan budidaya tanaman hutan pada lahan masyarakat guna meningkatkan kondisi lahan dan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat (Ethika dkk., 2014). Untuk mendukung upaya ini pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hutan rakyat dan menetapkan ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat (Puspitojati dkk., 2014).

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahan yang ada. Sebelum ada otonomi daerah maka segala ijin pengelolaan hutan berada pada kewenangan pusat, namun sekarang daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian ijin pengelolaan hutan. Pelimpahan kewenangan ini

bertujuan agar pengelolaan hutan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mengurangi kerusakan hutan serta pemerintah daerah dapat mendapatkan manfaat dari sumber daya alamnya, namun pelaksanaannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Lahirnya PP No. 38/2007 yang mengatur kewenangan sektor kehutanan belum juga dapat menjamin terwujudnya *good forestry governance* (Frediantoro, 2011).

Pengelolaan hutan oleh pemerintah juga melibatkan masyarakat, salah satu bentuk kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka *social forestry*. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan atau kemitraan (Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007). *social forestry* hadir dalam mewujudkan kelestarian sumber daya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan (Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.01/Menhut-II/2004).

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala, salah satunya adalah bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya bersifat *bottom up* (Iskandar dkk., 2011). Menurut (Wilujeng, 2015) kelemahan program pengelolaan hutan selama ini karena masih rendahnya proses pengambil keputusan secara *bottom up*. Pemerintah hanya melihat bahwa kesejahteraan masyarakat bisa dicapai hanya dengan meningkatkan pendapatan.

Potensi hutan rakyat yang cukup besar diharapkan mampu mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan. Melihat dari potensi

yang dihasilkan maka pengelolaan hutan rakyat harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus dapat mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan yang berkualitas dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kualitas lingkungan (Widiawan, H, 2017).

Potensi hutan rakyat yang besar tidak serta merta memberikan jaminan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini karena kayu hasil hutan rakyat belum mampu bersaing di pasar, terutama untuk produk ekspor (Palmolina, 2015). Ada tuntutan konsumen luar negeri yang menghendaki agar produk-produk kayu dari Indonesia merupakan hasil produk yang berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Pengelolaan hutan rakyat masih belum mengacu pada aspek-aspek manajemen hutan yang berkelanjutan (Suryandari dkk., 2017).

Pengelolaan hutan rakyat juga tidak terlepas kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena dalam pengelolaan hutan rakyat terdapat istilah “tebang butuh” sifat pengelolaan hutan rakyat adalah subsisten. Pemanenan dilakukan sesuai dengan kebutuhan keluarga, seperti untuk biaya sekolah, hajatan atau memenuhi kebutuhan untuk konstruksi rumah sendiri (Ethika dkk., 2014). Masyarakat akan melakukan pemanenan yang cenderung berlebih ketika mereka didesak pada kebutuhan ekonomi yang tinggi. Menurut (Prameshti & Haryanto, 2010) mengatakan adanya kesulitan dalam mengendalikan kegiatan pemanenan di hutan rakyat, hal ini terkait dengan belum adanya landasan hukum dalam kegiatan pemanenan tersebut. Jika dibiarkan begitu saja maka akan berpengaruh kepada keberlanjutan hutan rakyat itu sendiri.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Lahan

Penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non-pertanian. Menurut penelitian (Harini dkk., 2019) penggunaan lahan pertanian dibedakan atas tegalan, sawah, kebun, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya, sedangkan penggunaan lahan nonpertanian dibedakan dalam penggunaan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya.

Perubahan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai suatu proses pilihan pemanfaatan ruang guna memperoleh manfaat yang optimum, baik untuk pertanian maupun non-pertanian (Eko & Rahayu, 2012). Menurut penelitian (Rezki et al, 2017) perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau aktivitas terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya, baik untuk tujuan komersial maupun industri. Sementara menurut penelitian (Wahyuni dkk., 2014) perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lain yang dapat bersifat permanen maupun sementara dan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang.

Penggunaan lahan untuk sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka perubahan penggunaan lahan ini bersifat permanen dan tidak dapat kembali (*irreversible*), tetapi jika beralih guna menjadi perkebunan biasanya bersifat sementara (Ariyanto dkk., 2015). Perubahan penggunaan

lahan pertanian berkaitan erat dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat (Wahyuni dkk., 2014). Perubahan penggunaan lahan pada umumnya dapat diamati dengan menggunakan data spasial dari peta penggunaan lahan dari beberapa titik tahun yang berbeda. Data penginderaan jauh seperti citra satelit, radar, dan foto udara sangat berguna dalam pengamatan perubahan penggunaan lahan (Rezki dkk., 2017).

Faktor utama penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan adalah peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan ini memiliki konsekuensi terhadap perkembangan ekonomi yang menuntut kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, infrastruktur dan jasa (Wahyuni dkk., 2014). Beberapa kajian dan penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan. Menurut (Hasanur & Putra, 2017) menyebutkan tiga faktor yang berpengaruh yaitu peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi dan peningkatan jumlah anggota kelompok pendapatan menengah ke atas di daerah perkotaan. Sementara (Sitorus dkk., 2012) menyatakan beberapa hal yang diduga sebagai penyebab proses perubahan penggunaan lahan, antara lain:

- 1) Tingginya permintaan atas lahan sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk.
- 2) *Market failure*: alih profesi bagi petani yang kemudian petani tersebut menjual sawahnya, sebagai akibat dari pergeseran struktur dalam perekonomian dan dinamika pembangunan.

3) *Government failure*: kebijakan pemerintah, misalnya memberikan peluang investasi di sektor industri namun tidak diikuti dengan kebijakan konversi lahan.

Selain itu, alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian dan penggunaan lain menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti kepunahan flora dan fauna, penurunan kesuburan tanah, erosi, banjir, kekeringan dan lain-lain. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang berubah fungsi menjadi penggunaan lain. Permasalahan penurunan luas kawasan hutan sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Dako dkk., 2018).

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Hutan Rakyat**

Berdasarkan ketentuan formal yang ada maka pembangunan hutan rakyat sesungguhnya didasarkan pada semangat desentralisasi melalui pelimpahan kewenangan dan administrasi pada pemerintahan daerah. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa serta instansi formal disektor kehutanan daerah dianggap lebih mengetahui potensi dan persebaran hutan rakyat (Kambey, 2015). Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengurusan administrasi formal pembangunan hutan rakyat merupakan bukti dari semangat tersebut. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi peran daerah menjadi sangat penting untuk memfasilitasi, mengkoordinasi, dan meregulasi pengembangan hutan rakyat (Soares dkk., 2015).

Usaha pengelolaan hutan rakyat dapat menyerap banyak tenaga kerja karena kegiatannya yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Pada umumnya hutan rakyat yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa tidak lebih dari 0,25 Hektar (Mayrowani & Ashari, 2011). Oleh sebab itu, umumnya pemilik berusaha memanfaatkan lahan dengan membudidayakan tanaman-tanaman yang bernilai tinggi, cepat menghasilkan, dan tanaman konsumsi sehari-hari. Selain pada pekarangan rumah, umumnya hutan rakyat ditemui pada lahan marginal (lahan yang tidak/kurang menghasilkan komoditi pangan) serta pada lahan-lahan terlantar (Risasmoko dkk., 2016). Faktor internal meliputi umur, pendidikan dan pengalaman bertani sedangkan faktor eksternal terdiri dari kelompok tani, penyuluhan dan akses informasi.

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Umur**

Menurut (Narso et al., 2012) mengatakan umur bukan merupakan faktor psikologis, tetapi sesuatu yang diakibatkan oleh umur adalah faktor psikologis. Terdapat dua faktor yang ditentukan oleh umur dalam menentukan kemampuan seseorang. Faktor pertama adalah mekanisme belajar dan kematangan otak dan faktor kedua adalah akumulasi pengalaman dan bentuk-bentuk proses belajar lainnya, umur petani akan mempengaruhi penerimaan terhadap inovasi hal-hal baru.

Umur merupakan suatu indikator umum suatu perubahan harus terjadi pada setiap individu. Umur menggambarkan pengalaman dalam diri seseorang hingga terdapat keragaman tindakannya berdasarkan umur

yang dimiliki. Umur berkorelasi dengan tingkat penerimaan suatu inovasi atau teknologi baru (Susanti dkk., 2016). (Manyamsari, 2014) mengatakan bahwa para pekerja yang sudah tua cenderung kurang luwes dan menolak teknologi baru. Umur juga berkorelasi dengan produktifitas, produktifitas akan merosot dengan bertambahnya usia seseorang. Keterampilan individu menyangkut kecepatan, kecekatan, kekuatan dan kordinasi menurun seiring berjalannya waktu dan kurangnya rangsangan intelektual semua berkontribusi terhadap menurunnya produktifitas.

## **2) Pendidikan**

(Susanti dkk., 2016) menyatakan bahwa pendidikan petani mempengaruhi cara dan pola pikir petani dalam mengelola usaha tani, pendidikan yang relatif tinggi dan umur yang muda menyebabkan petani lebih dinamis. (Hijri dan Riyono, 2018) menjelaskan salah satu faktor yang dapat mengubah pola pikir dan daya nalar petani adalah pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan pada manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

## **3) Pengalaman Berusaha tani**

(Arvianti dkk., 2019) mengemukakan bahwa pengalaman yang menyenangkan dan yang mengecewakan akan berpengaruh pada proses belajar, seseorang yang pernah mengalami keberhasilan dalam proses belajar, maka memiliki perasaan optimis akan berhasil dimasa akan datang, sebaliknya seseorang yang pernah memiliki pengalaman mengecewakan, maka memiliki persaaan pesimis untuk dapat berhasil. Pengalaman

seseorang bertambah sejalan dengan bertambahnya usia. Pengalaman dapat diukur secara kualitatif berdasarkan jumlah tahun seseorang dalam bidang usaha tani. Konsekuensi masa depan ditentukan oleh pengalaman masa lalu, dampak dari pengalaman serta pengamatan seseorang terhadap yang lain.

## **b. Faktor Exsternal**

### **1) Kelompok Tani Hutan Rakyat**

Kelompok tani merupakan tempat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosiologis, kebutuhan ekonomis dan kebutuhan psikologis. Manusia dapat mengembangkan potensi, aktualisasi dan eksistensi dirinya dengan berkelompok. Hal ini disebabkan adanya naluri untuk selalu hidup dengan orang lain atau gregariousness sehingga manusia disebut *social animal* (Nuryanti & Swastika, 2011). Perkembangan kelompok tani didasarkan atas faktor–faktor pengikat antara lain, yaitu adanya kepentingan bersama dengan anggotannya, adanya kesamaan kondisi sumber daya alam dalam berusaha tani, adanya saling percaya mempercayai antara sesama anggota. Kerjasama antara individu anggota kelompok dalam proses belajar, proses memproduksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil untuk peningkatan pendapatan dan kehidupan yang layak dapat dijalin melalui pendekatan kelompok (Oktalina dkk., 2015).

### **2) Kegiatan Penyuluhan**

Penyuluhan memiliki pengertian sebagai suatu bentuk pendidikan non formal yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai kehidupan yang lebih

baik (Oktalina dkk., 2015). (Fauzi, 2017) menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan pendidikan pemecahan masalah (*problem solving*) yang berorientasi pada tindakan untuk mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan, memotivasi tetapi tidak melakukan pengaturan (*regulating*) dan tidak melaksanakan program yang non edukatif.

### **3) Akses Informasi**

(Apriyanto et al., 2016) menuliskan bahwa budidaya hutan rakyat di Jawa dengan hasil utama kayu berkembang karena adanya pasar (termasuk yang mengatur perilaku efisiensi dan gengsi) untuk peralatan rumah tangga, peti kemas, pulp dan penggunaan lain-lain. Pasar itulah yang menentukan jenis tanaman. Pemilihan komoditas juga berdasarkan luasan hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Pada umumnya pemilik berusaha memanfaatkan lahan dengan membudidayakan tanaman-tanaman yang bernilai tinggi, cepat menghasilkan dan tanaman konsumsi sehari-hari.

#### **D. Strategi dalam Pengelolaan Hutan Rakyat**

Strategi pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap hutan alam dalam bentuk eksploritasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Kementrian kehutanan mengagendakan bahwa tahun 2010 - 2024 akan melakukan penanganan hutan rakyat secara lebih serius. Kebutuhan bahan baku industri kehutanan yang mencapai 80 juta m<sup>3</sup> pertahun masih jauh dalam kemampuan hutan Negara untuk memenuhinya yakni baru sebesar 25 juta m<sup>3</sup> pertahun. Lebih jauh ditetapkan bahwa pola kemitraan yang telah dibangun dan akan dilaksanakan sebagai pilar utama yakni: kelompok

tani hutan rakyat, pengusaha industri kehutanan dimana pemerintah baik berupa pola kemitraan umum maupun kemitraan inti plasma akan menjadi perhatian utama pemerintah (Bappenas/Kementerian PPN, 2019).

Arahan kebijakan yang mendukung berdirinya sentra-sentra industri kehutanan dan basis data tentang hutan rakyat. Namun, dalam prespektif yang lebih luas, proses penurunan kualitas hutan yang terus berlangsung selama ini di sebabkan oleh *illegal logging*, perambahan, kelangkaan bahan baku industri, dan penurunan kualitas ekosistem hutan, serta isu kesejahteraan masyarakat sekitar yang menyebabkan pemerintah harus memformulasikan program-program prioritas untuk mengatasinya (Hakim dkk., 2010).

Sementara (Purwanto & Sabarnuridin, 2016) menyatakan bahwa pembangunan hutan rakyat terinspirasi dari kisah sukses dari proyek kegiatan penghijauan dalam penanganan lahan kritis. Kemudian manfaat ekonomi yang telah dirasakan oleh masyarakat peserta penghijauan memberikan inspirasi bagi mereka untuk mengembangkan sendiri budidaya tanaman kehutanan sehingga berkembang sentra-sentra hutan rakyat. Namun dari dua latar belakang tersebut memiliki persamaan atau satu isu sentral yakni kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka pembangunan hutan rakyat merupakan cikal bakal upaya masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kebanyakan permasalahan kehutanan adalah berpangkal dari isu kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Setiawan dkk., 2014).

Taraf hidup masyarakat yang masih bersifat subsisten mengakibatkan tekanan yang besar terhadap karena hutan dianggap

sebagai sumberdaya yang paling dekat dan berada di lingkungannya. Berpijak dari isu utama tersebut maka pemerintah mencanangkan program pemberdayaan masyarakat desa hutan (Ethika dkk., 2014). Program pembangunan hutan rakyat adalah salah satu perwujudannya. Disisi lain, kebijakan ini sekaligus memberikan peran kepada masyarakat untuk terlibat dalam upaya keberlangsungan industri kehutanan, penurunan illegal logging, perambahan dan sekaligus peningkatan kualitas ekosistem hutan (Puspitojati dkk., 2014).

### **E. Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan**

Pengelolaan hutan berada pada keadaan kelestarian hasil apabila besarnya hasil sama dengan pertumbuhannya dan berlangsung secara terus menerus. Secara umum dikatakan bahwa jumlah maksimum hasil yang dapat diperoleh dari hutan pada suatu waktu tertentu adalah jumlah kumulatif pertumbuhan sampai waktu itu sedangkan jumlah maksimum hasil yang dapat dikeluarkan secara terus menerus secara periode sama dengan pertumbuhan dalam periode waktu itu (Annisa & Zunariyah, 2018).

Pengelolaan hutan dapat dikatakan lestari bila dapat menyediakan suplai kayu selama bertahun-tahun dari tebangan yang dilakukan terhadap tegakan yang telah mencapai kondisi masak tebang. Kelestarian hutan tidak hanya memperhatikan volume hasil yang tetap jumlahnya, tetapi juga harus memasukkan bentuk dan kualitas batang serta nilai uang yang dihasilkan (Purbawiyatna dkk., 2011).

Pengelolaan hutan berkelanjutan atau *Sustainable Forest Management* (SFM) merupakan prinsip dalam mengelola hutan untuk

mencapai satu atau lebih tujuan yang ditentukan menyangkut kontinuitas produksi hasil dan manfaat lain yang diinginkan tanpa mengakibatkan kemunduran nilai produktivitas hutan dimasa datang dan menimbulkan efek yang merugikan pada lingkungan fisik dan sosial (Sukwika dkk., 2018).

Menurut (Purbawiyatna dkk., 2011) tentang prinsip-prinsip kelestarian, merumuskan kelestarian pengelolaan hutan dilihat pada tiga manfaat pokok hutan, yaitu kelestarian manfaat ekologis, sosial, dan ekonomis, sebagai berikut:

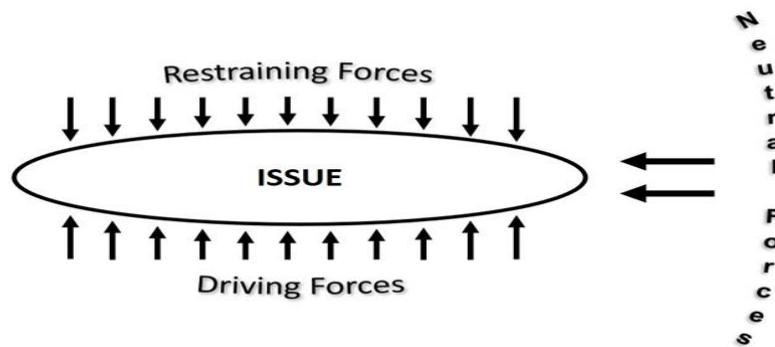
- a) Kelestarian manfaat ekologis, mencakup pemeliharaan viabilitas, fungsi ekosistem hutan dan ekosistem di sekitarnya pada level yang sama atau lebih tinggi. Ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap mempertahankan produktivitas, adaptabilitas, dan kemampuannya untuk pulih kembali. Hal ini menghendaki pelaksanaan pengelolaan hutan yang menghargai atau didasarkan atas proses-proses alami.
- b) Kelestarian manfaat sosial, mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari secara sosial apabila bersesuaian dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui batas ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan.
- c) Kelestarian manfaat ekonomi, menunjukkan bahwa manfaat dari hutan melebihi biaya yang dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

## **F. Beberapa Metode Analisis Strategi Pengambilan Keputusan**

### **1. *Force Field Analysis* (FFA) atau Analisis Medan Kekuatan**

*Force Field Analysis* dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dalam (White, 1987) dan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Analisis ini adalah metode yang kuat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda yang bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula untuk menilai sumber dan kekuatan mereka.

FFA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam perubahan dan mengidentifikasikan berbagai sebab serta pemecahan dari suatu masalah. FFA berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Hal ini didasarkan pada ide bahwa terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung perubahan dan kekuatan kedua menolak perubahan. Analisis tersebut memberikan tawaran yang bisa dilakukan yaitu memperkuat kekuatan pendukung dan menetralkan kekuatan yang menolak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Analisis Medan Kekuatan

Analisis medan daya disingkat FFA bertujuan memberikan gambaran permasalahan dan keadaan-keadaan yang tidak dapat diubah dan memberikan analisis tentang cara menghapuskan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan. Untuk mengetahui posisi progres strategi pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat, dilakukan analisis faktor strategis internal dan eksternal. Analisis faktor strategis internal (merupakan prosedur pengolahan faktor faktor strategis pada lingkungan internal. Sedangkan analisis faktor strategi eksternal (merupakan penilaian terhadap faktor internal dan eksternal dilakukan dengan memberikan pembobotan dan peringkat pada setiap faktor strategis.

*Force Field Analysis* adalah kelanjutan alamiah dari *problem tree analysis* yang sering digunakan untuk membantu mengidentifikasi tujuan suatu perubahan kebijakan. *Force Field Analysis* digunakan dan diterapkan untuk melakukan manajemen perubahan. Perubahan dapat berhasil jika kekuatan pendorong perubahan lebih besar daripada kekuatan penghambat yang menolak perubahan. Sasaran utama *Force Field Analysis* dalam upaya mempengaruhi kebijakan adalah menemukan cara untuk mengurangi kekuatan penghambat sekaligus mencari peluang untuk

mendapat keuntungan dari kekuatan pendorong. Selama proses diskusi *Force Field Analysis* diharapkan muncul debat dan dialog diantara peserta kelompok. Hal ini merupakan bagian penting dalam *Force Field Analysis*, dan diperlukan waktu untuk membahas isu kunci. Temuan dan gagasan bisa muncul terkait dengan hal yang terkait dengan kepedulian, masalah, symptom dan solusi. Semua proses perlu dicatat dan ditelaah dan selanjutnya dapat diadakan konsensus tentang aksi atau tindakan di waktu yang akan datang.

FFA paling tepat dikerjakan oleh suatu kelompok kecil yang terdiri dari enam hingga delapan orang, dengan menggunakan *flip chart* atau *overhead* transparansi sehingga semua peserta dapat melihat proses pembahasan yang berlangsung (Start dan Hovland, 2009). Pertama yang perlu dilakukan dalam FFA adalah menyepakati bidang perubahan yang akan dibahas. Bidang perubahan ini dapat ditulis sebagai sasaran kebijakan atau tujuan yang ingin dicapai.

## **2. Analytical Hierarchy Process (AHP)**

*Analytic Hierarchy Process* (AHP) dikembangkan oleh Prof. Thomas L. Saaty sebagai algoritma pengambilan keputusan untuk permasalahan multikriteria (*Multi Criteria Decision Making* atau MCDM). Permasalahan multikriteria dalam AHP disederhanakan dalam bentuk hierarki yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tujuan atau *goal* dari pengambilan keputusan, kriteria penilaian, dan alternatif pilihan. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi

hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat (Saaty, 1993).

Menurut Saaty (1993), ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hierarki (*Decomposition*), prinsip menentukan prioritas (*Comparative Judgement*), dan prinsip konsistensi logis (*Logical Consistency*). Hierarki yang dimaksud adalah hierarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hierarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi.

*Analytic Hierarchy Process* (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari (Saaty, 1980):

- 1). *Resiprocal Comparison*, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah  $k$  kali lebih penting dari pada B maka B adalah  $1/k$  kali lebih penting dari A.
- 2). *Homogeneity*, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.
- 3). *Dependence*, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (*complete hierarchy*) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (*incomplete hierarchy*).

- 4). *Expectation*, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Secara umum pengambilan keputusan dengan metode AHP didasarkan pada langkah langkah berikut (Sinaga,2009):

- 1). Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
- 2). Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria kriteria dan alternaif alternatif pilihan yang ingin di rangking.
- 3). Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemenlainnya.
- 4). Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen didalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
- 5). Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai *eigen vector* yang dimaksud adalah nilai *eigen vector* maksimum yang diperoleh dengan menggunakan matlab maupun dengan manual.
- 6). Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.
- 7). Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen.

Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan.

- 8). Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan  $CR < 0,100$ , maka penilaian harus diulang kembali.

Rasio Konsistensi (CR) merupakan batas ketidakkonsistenan (*inconsistency*) yang ditetapkan Saaty. Angka pembanding pada perbandingan berpasangan adalah skala 1 sampai 9. Selanjutnya dapat dilihat pada uraian berikut:

Skala 1 = setara antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang  
Lainnya

Skala 3 = kategori sedang dibandingkan dengan kepentingan lainnya

Skala 7 = kategori amat kuat dibandingkan dengan kepentingan lainnya

Skala 9 = kepentingan satu secara ekstrim lebih kuat dari kepentingan lainnya. Prioritas alternatif terbaik dari total rangking yang diperoleh merupakan rangking yang dicari dalam AHP ini.

### 3. Rumus Pendapatan Hutan Rakyat

Pada perhitungan kontribusi ini, petani responden akan dikelompokkan berdasarkan strata luas lahan hutan rakyat. Seluruh responden akan diwawancarai mengenai jumlah keseluruhan lahan hutan rakyat yang dimilikinya, selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan strata luas lahan. Rumus-rumus yang digunakan dalam analisis ini antara lain (Diniyati & Achmad, 2015):

- 1) Pendapatan dari hutan rakyat

$$P_{hr} = P_{ky} + P_{tp} + P_{bb}$$

Dimana :

$P_{hr}$  = Pendapatan kayu dari hutan rakyat (Rp/tahun)

$P_{ky}$  = Pendapatan dari kayu

$P_{tp}$  = Pendapatan tanaman perkebunan

$P_{bb}$  = Pendapatan dari buah-buahan;

2) Kontribusi

$$KR = \frac{P_{hr}}{P_{rt}} \times 100\%$$

Dimana :

KR = Kontribusi pendapatan dari hutan rakyat (%)

$P_{hr}$  = Pendapatan dari hutan rakyat (Rp/tahun)

$P_{rt}$  = Pendapatan total rumah tangga (Rp/tahun)

Perhitungan riap pohon dilakukan dengan menghitung riap rata-rata tahunan/ mean annual increment (MAI)

$$MAI = \frac{Dt}{t}$$

dimana:

$Dt$  = diameter tinggi pohon pada umur ke- $t$  (Volume pohon Aktual)

$t$  = umur pohon (tahun).

1) Rumus Penerimaan

$$\text{Penerimaan/ Tahun} = MAI \times Hk$$

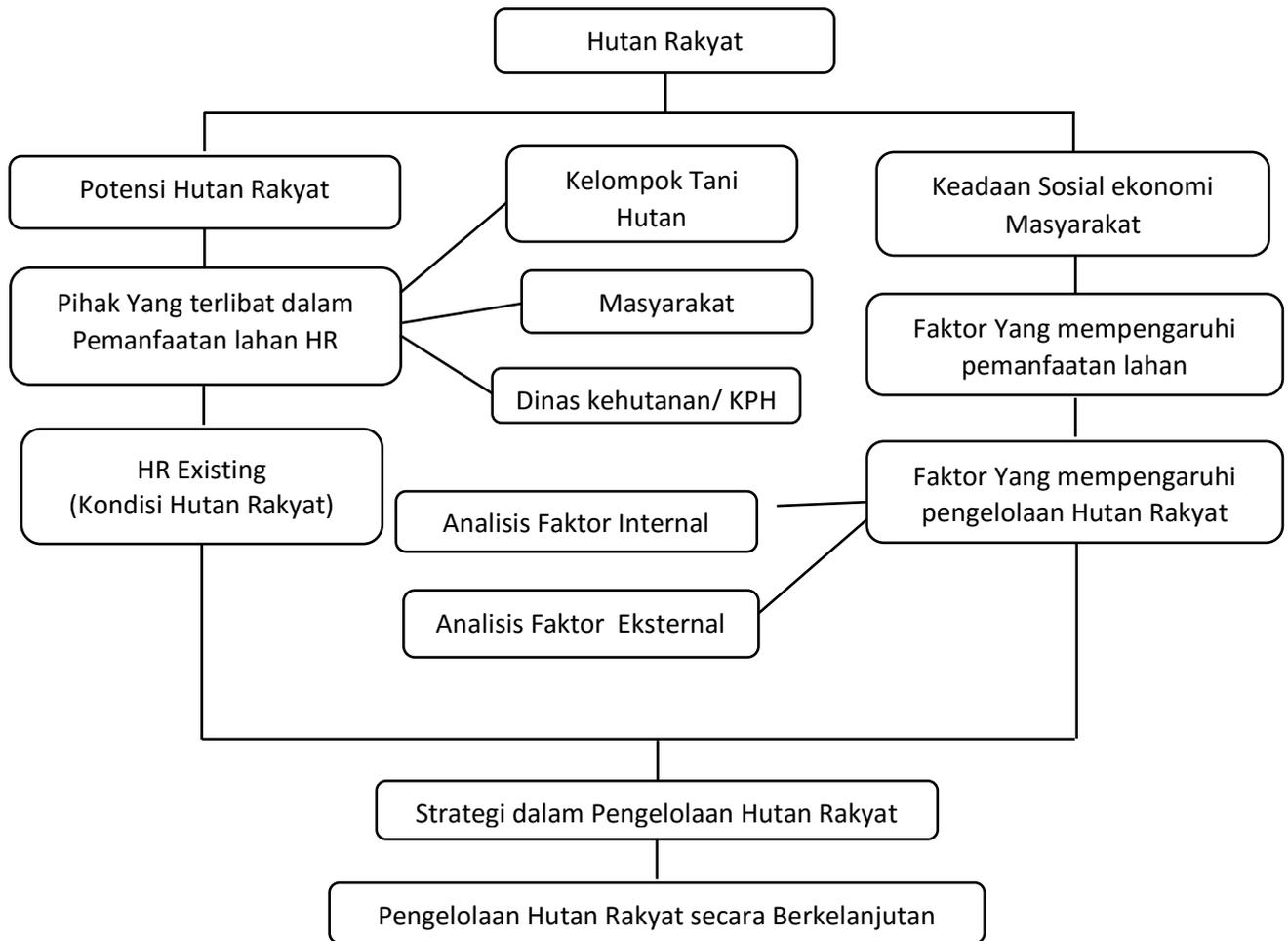
Dimana :

MAI = Mean Annual Increment (Riap-rata tahunan).

$Hk$  = Harga kayu;

## H. Kerangka Pikir Penelitian

Pengelolaan hutan rakyat sangat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai kebutuhan hidup. Potensi hutan rakyat dipengaruhi jenis tanaman pertanian yang dikembangkan serta tanaman kehutanan yang ditanam. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat berguna karena dapat merumuskan persoalan dengan lebih efektif, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengelola hutan sering bertentangan dengan pengelolaan hutan rakyat. Hutan rakyat dipengaruhi oleh jenis tanah atau benih yang disediakan oleh Dinas Kehutanan yang tidak sesuai dalam peruntukan lahan masyarakat. Dalam penelitian ini di fokuskan kepada pengelolaan hutan rakyat serta potensi hutan rakyat yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kelompok tani terlibat dalam pemanfaatan hutan rakyat serta Dinas Kehutanan atau KPH memantau jalannya perkembangan hutan rakyat sampai saat ini. Membuatkan strategi dalam Pengelolaan Hutan Rakyat untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik lagi serta pengelolaan Hutan Rakyat secara berkelanjutan. Kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian.